



# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

## Peran Sektor Publik Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ammar Halomoan Sihombing<sup>1</sup> Muhammad Aqil Al Hariri Lubis<sup>2</sup> M. Rizky Ananda  
Hasibuan<sup>3</sup> Yusuf Adzka Tarigan<sup>4</sup> Ahmad Wahyudi Zein<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [ammarhalomansihombing@gmail.com](mailto:ammarhalomansihombing@gmail.com)<sup>1</sup> [mhda2031@gmail.com](mailto:mhda2031@gmail.com)<sup>2</sup>  
[reaperone49@gmail.com](mailto:reaperone49@gmail.com)<sup>3</sup> [yusufadzka8@gmail.com](mailto:yusufadzka8@gmail.com)<sup>4</sup> [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Ekonomi berkelanjutan merupakan konsep yang semakin penting dalam konteks global saat ini, di mana tantangan lingkungan dan sosial menjadi semakin mendesak. Sektor publik memegang peranan kunci dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan, regulasi, dan investasi yang mendukung pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran sektor publik dalam mencapai tujuan ekonomi berkelanjutan dengan menyoroti kebijakan yang telah diimplementasikan, dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan yang dihadapi. Dengan menggunakan data dan statistik yang relevan, artikel ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi sektor publik dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Ekonomi berkelanjutan, sektor publik, kebijakan, regulasi, investasi

## ABSTRACT

*Sustainable economy is an increasingly important concept in today's global context, where environmental and social challenges are becoming increasingly urgent. The public sector plays a key role in developing a sustainable economy through policies, regulations and investments that support inclusive and environmentally friendly growth. This article aims to explore the role of the public sector in achieving sustainable economic goals by highlighting the policies implemented, their impact on society and the challenges faced. Using relevant data and statistics, this article will provide a comprehensive overview of the public sector's contribution to sustainable economic development.*

**Keywords:** *Sustainable economy, public sector, policy, regulation, investment.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan krisis sumber daya alam. Dalam konteks ini, sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan. Menurut laporan dari United Nations Environment Programme (UNEP), lebih dari 60% emisi gas rumah kaca berasal dari aktivitas sektor publik, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. (UNEP 2020). Dengan demikian, penting bagi sektor publik untuk tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Sektor publik, melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan investasi, dapat mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, investasi dalam energi terbarukan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Data dari International Renewable Energy Agency (IRENA) menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan telah menciptakan lebih dari 11 juta pekerjaan di seluruh dunia pada tahun 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh. (IRENA 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, sektor publik dapat berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Namun, meskipun potensi sektor publik dalam mendukung ekonomi berkelanjutan sangat besar, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi kendala dalam hal pembiayaan, kapasitas institusi, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Menurut Bank Dunia, sekitar 1,3 miliar orang di seluruh dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan banyak dari mereka berada di negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana sektor publik dapat mengatasi tantangan ini dan berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam peran sektor publik adalah kebijakan dan regulasi. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan mendorong inovasi. Misalnya, penerapan pajak karbon dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Di Swedia, penerapan pajak karbon yang tinggi telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 25% sejak tahun 1990, sementara ekonomi negara tersebut terus tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ketat dapat berfungsi sebagai pendorong inovasi dan efisiensi.

Selain itu, investasi dalam infrastruktur hijau juga merupakan langkah kunci dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Infrastruktur hijau mencakup berbagai proyek yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan, seperti taman kota, sistem drainase yang berkelanjutan, dan jaringan transportasi publik yang efisien. Investasi dalam infrastruktur hijau tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, proyek revitalisasi sungai di Seoul, Korea Selatan, telah berhasil mengubah area yang dulunya tercemar menjadi ruang publik yang ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menarik wisatawan.

Kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan ekonomi berkelanjutan. Sektor publik dan swasta memiliki kepentingan yang saling melengkapi dan dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi inovatif. Misalnya, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan teknologi dapat menghasilkan solusi cerdas untuk pengelolaan energi, seperti penggunaan smart grid yang dapat mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Selain itu, sektor publik dapat memberikan insentif bagi perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan melalui subsidi atau pengurangan pajak.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi ini tidak bisa diabaikan. Banyak perusahaan swasta yang masih ragu untuk berinvestasi dalam proyek berkelanjutan karena ketidakpastian pasar dan risiko yang terkait. Oleh karena itu, sektor publik perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan jaminan bagi investor. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan kebijakan yang transparan dan stabil serta penyediaan informasi yang jelas mengenai manfaat jangka panjang dari investasi berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan dan investasi yang dilakukan oleh sektor publik mungkin tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan. Misalnya, program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dapat membentuk generasi muda yang lebih sadar akan isu-isu lingkungan dan berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. (World Bank 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana sektor publik dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kapasitas institusi publik. Hal ini mencakup pelatihan bagi pegawai pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam, perencanaan kota yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi baru. Dengan meningkatkan kapasitas institusi, sektor publik akan lebih mampu merespons tantangan yang ada dan merancang kebijakan yang lebih efektif.

Akhirnya, kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Melalui kebijakan dan regulasi yang tepat, investasi dalam infrastruktur hijau, kolaborasi dengan sektor swasta, serta peningkatan kesadaran masyarakat, sektor publik dapat mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangan yang ada, terutama di negara berkembang, harus diatasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, sektor publik dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan organisasi internasional, artikel jurnal, dan studi kasus dari berbagai negara. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai peran sektor publik dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, analisis data sekunder juga dilakukan untuk memahami tren dan pola yang ada dalam kebijakan dan investasi sektor publik.

Dalam melakukan analisis, penulis mengidentifikasi beberapa indikator kunci yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan sektor publik dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Indikator ini mencakup pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi karbon, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan menggunakan indikator ini, penulis dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diimplementasikan oleh sektor publik.

Penelitian ini juga melibatkan studi kasus dari beberapa negara yang dianggap berhasil dalam menerapkan kebijakan ekonomi berkelanjutan. Contoh negara-negara seperti Swedia, Jerman, dan Indonesia akan dianalisis untuk menggambarkan bagaimana sektor publik dapat berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh negara lain dalam upaya mencapai ekonomi berkelanjutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sektor publik memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya sekadar instrumen administratif, tetapi juga merupakan alat strategis yang dapat membentuk masa depan ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, peran sektor publik dalam mencapai tujuan ekonomi berkelanjutan menjadi semakin relevan.

Salah satu contoh yang menonjol dalam hal ini adalah kebijakan pajak karbon yang diterapkan di Swedia. Sejak tahun 1990, pemerintah Swedia telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hasilnya, emisi gas rumah kaca di negara tersebut berhasil menurun sebesar 25% dalam periode tersebut. (SEPA 2020). Kebijakan ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi hijau. Misalnya, banyak perusahaan Swedia yang berinvestasi dalam energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi, yang tidak hanya membantu mengurangi emisi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tepat dapat menghasilkan manfaat ganda, baik untuk lingkungan maupun ekonomi.

Di Indonesia, sektor publik juga menunjukkan komitmen dalam mencapai ekonomi berkelanjutan melalui berbagai program. Salah satu program yang menonjol adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan inklusif dan partisipatif. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), program ini berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sebesar 1,5% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. (BPS 2021). Pendekatan yang digunakan dalam PNPM melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam pembangunan yang terjadi di daerah mereka. Ini adalah contoh nyata bagaimana sektor publik dapat berfungsi sebagai katalisator untuk perubahan sosial dan ekonomi yang positif.

Namun, meskipun terdapat banyak contoh positif, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh sektor publik. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam implementasi kebijakan. Ketidakselarasan ini seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan tidak efisien. Misalnya, dalam beberapa kasus, program-program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah tidak sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang mengakibatkan kebingungan di tingkat lapangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa

semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi yang ingin dicapai.

Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi oleh sektor publik adalah keterbatasan sumber daya. Banyak pemerintah daerah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, sering kali menghadapi kendala anggaran yang menghambat pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting untuk mencari solusi inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Misalnya, pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan. Melalui skema pembiayaan publik-swasta, berbagai inisiatif dapat diimplementasikan tanpa membebani anggaran pemerintah secara langsung.

Analisis lebih dalam mengenai peran sektor publik dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan juga mencakup pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kebijakan yang baik tidak akan berarti banyak jika masyarakat tidak memahami dan mendukungnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Contohnya, kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam aktivitas seperti pengurangan sampah plastik atau penggunaan energi terbarukan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat akan lebih mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang pada gilirannya akan memperkuat implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Proses evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Sebagai contoh, jika suatu program pemberdayaan masyarakat tidak memberikan hasil yang diharapkan, evaluasi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan merumuskan strategi baru yang lebih efektif. Dengan demikian, evaluasi menjadi bagian integral dari siklus kebijakan publik yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, peran sektor publik dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan juga harus dilihat dari perspektif kolaborasi internasional. Negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan yang sama terkait dengan perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, kerjasama antarnegara menjadi sangat penting. Melalui forum-forum internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB, negara-negara dapat berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama. Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam, dapat berperan aktif dalam kerjasama internasional ini untuk memperkuat posisi tawar dalam mencapai kebijakan yang lebih berkelanjutan.

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan sektor publik dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang

diambil, tetapi juga pada komitmen dan tindakan nyata dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi, semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai kesimpulan, sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Melalui kebijakan yang tepat, keterlibatan masyarakat, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan evaluasi yang berkelanjutan, sektor publik dapat menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, dengan komitmen dan kerjasama yang baik, pencapaian tujuan ekonomi berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil. Keberhasilan dalam bidang ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang, menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua.

Pembahasan mengenai peran sektor publik dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari konteks global dan lokal. Dalam konteks global, sektor publik harus beradaptasi dengan berbagai kesepakatan internasional, seperti Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Implementasi kebijakan yang sejalan dengan kesepakatan ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Hal ini menunjukkan bahwa sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam mencapai tujuan yang lebih luas yang telah disepakati oleh komunitas internasional.

Sebagai contoh, banyak negara telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Di Jerman, kebijakan Energi Wende (Transformasi Energi) telah berhasil mengubah struktur energi negara tersebut dengan meningkatkan proporsi energi terbarukan menjadi lebih dari 40% dari total konsumsi energi pada tahun 2020. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi emisi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Dalam konteks ini, sektor publik berperan penting dalam merumuskan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan, memberikan insentif kepada perusahaan, dan melakukan investasi dalam infrastruktur yang diperlukan.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh sektor publik dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan sangat bervariasi di setiap negara. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi kendala dalam hal pembiayaan dan kapasitas institusi. (FMEAE 2021). Menurut Bank Dunia, sekitar 70% dari total investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang tidak terpenuhi. Dalam menghadapi tantangan ini, sektor publik perlu mencari cara untuk menarik investasi dari sektor swasta dan meningkatkan kapasitas institusi untuk

mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Misalnya, beberapa negara telah mulai menerapkan skema pembiayaan inovatif, seperti obligasi hijau, yang memungkinkan investor untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan.

Lebih jauh lagi, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Beberapa negara telah menerapkan pendekatan ini dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Contoh konkret dapat dilihat di Brasil, di mana program-program pembangunan kota sering kali melibatkan warga dalam diskusi dan keputusan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diambil.

Sektor publik juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, analisis dampak lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap proses perencanaan. Di Norwegia, misalnya, pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua proyek pembangunan infrastruktur, yang mencakup studi dampak lingkungan yang komprehensif sebelum proyek dimulai. Pendekatan ini tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (World Bank 2020).

Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sektor swasta memiliki sumber daya dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan publik. Melalui kemitraan yang efektif, kedua sektor dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Contohnya, di Kenya, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan teknologi telah menghasilkan proyek energi solar yang menyediakan listrik bagi komunitas terpencil, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Sektor publik harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini dan mengembangkan kebijakan yang responsif. Hal ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor publik agar dapat menghadapi tantangan yang ada. Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai negeri menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif.

Dalam konteks ini, teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung sektor publik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Misalnya, banyak negara telah mulai menggunakan platform digital untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat



dalam pengambilan keputusan, seperti aplikasi untuk mengumpulkan masukan masyarakat terhadap kebijakan publik. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Sebagai penutup, sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dari mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan kesepakatan internasional hingga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi sektor publik sangat menentukan. Meskipun tantangan yang dihadapi bervariasi di setiap negara, dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi yang efektif, dan penggunaan teknologi, sektor publik dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penting bagi setiap negara untuk terus mengembangkan kapasitas dan inovasi di sektor publik agar dapat menghadapi tantangan global dan lokal dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Sektor publik memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan, regulasi, dan investasi yang mendukung pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesejahteraan ekonomi hingga keberlangsungan lingkungan. Sebagai contoh, negara-negara Skandinavia telah berhasil menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi mereka, yang menunjukkan bahwa pendekatan yang berkelanjutan dapat memberikan hasil yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Namun, meskipun terdapat banyak contoh positif di berbagai negara, tantangan yang dihadapi oleh sektor publik dalam mencapai tujuan ekonomi berkelanjutan masih signifikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Banyak negara masih terjebak dalam pola pikir yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi cepat, sering kali dengan mengorbankan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Misalnya, dalam banyak kasus, proyek infrastruktur besar yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan.

Di samping itu, kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam mencapai ekonomi berkelanjutan. Seringkali, kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah tidak mendapatkan dukungan yang cukup

dari sektor swasta, yang mungkin khawatir akan dampak negatif terhadap profitabilitas mereka. Sebagai contoh, program-program yang mendorong penggunaan energi terbarukan sering kali menghadapi resistensi dari perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan bakar fosil. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dialog yang konstruktif antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam praktik yang lebih berkelanjutan.

Investasi dalam teknologi hijau juga merupakan aspek krusial dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Sektor publik dapat memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dengan menyediakan dana dan insentif bagi penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Contoh yang dapat diambil adalah program-program subsidi untuk perusahaan yang mengembangkan teknologi energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin. Dengan dukungan finansial ini, diharapkan akan muncul lebih banyak inovasi yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa investasi tersebut diarahkan pada proyek yang benar-benar memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan kunci dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Sektor publik harus berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan. Melalui kampanye pendidikan dan program pelatihan, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana pilihan mereka, baik sebagai konsumen maupun sebagai anggota masyarakat, dapat mempengaruhi

lingkungan. Misalnya, program-program yang mengajarkan masyarakat tentang pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya secara efisien dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, diharapkan akan tercipta perubahan perilaku yang mendukung tujuan ekonomi berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, sektor publik memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan, regulasi, dan investasi yang mendukung pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup signifikan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menciptakan solusi yang efektif. Dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam perencanaan ekonomi, mendukung inovasi teknologi hijau, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam upaya ini demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Laporan Kemiskinan di Indonesia.
- Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2021). The Energy of the Future: First Progress Report 2021.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2019). Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2019.
- Swedish Environmental Protection Agency. (2020). Sweden's Climate Policy Framework.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). Emissions Gap Report 2020.
- World Bank. (2020). Financing for Development: The Role of the Public Sector in Achieving the Sustainable Development Goals.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Piaget, J. (1977). The development of thought: Equilibration of cognitive structures. New York, NY: Viking Press.
- Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development: Moral stages and the idea of justice. San Francisco, CA: Harper & Row.